

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi telah memunculkan berbagai kelemahan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat (Syachbrani, 2009). Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi (Thesaurianto, 2007).

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah (Lugina, 2012). Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara mamadai. Jadi, dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang

kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Halim, 2007). Pelaksanaan otonomi daerah secara normatif ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan potensi dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintah harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah instansi. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerja sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi atau program dan kegiatan dalam pengukuran kinerja terdiri dari aktifitas pendokumentasian proses pelaksanaan yang terdiri dari proses dan aktifitas yang dilakukan untuk mengubah input (sumber daya yang digunakan selama kegiatan) menjadi output (barang jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan) (Dedi dan Ayuningtyas, 2011).

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran, khususnya yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output (Mardiasmo, 2009).

Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambil keputusan untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis (Mardiasmo, 2009). Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk

mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut (Mardiasmo, 2009). Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kinerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Dedi dan Ayuningtyas, 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan pelaksanaan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pada daerah. Evaluasi Kemampuan Pelaksanaan Otonomi Daerah dilakukan untuk menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan kemampuan daya saing

daerah. Untuk aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan penunjang pada bidang penanaman modal, indikator kinerja kunci yang digunakan untuk EKPOD adalah jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dan rasio daya serap tenaga kerja.

Menurut pandangan makro ekonomi, salah satu kegiatan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi adalah investasi (penanaman modal). Kegiatan tersebut merupakan faktor yang mendinamisasi keseimbangan pendapatan nasional dan selanjutnya pendapatan nasional yang dinamis dan berkembang akan lebih mendorong masuknya investor untuk melakukan investasi. Di sisi lain menurut pandangan mikro ekonomi, investasi merupakan langkah pembelanjaan sumber daya dan sumber dana untuk membangun fasilitas produksi baru atau tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar keuntungan/laba (Sukirno, 2004).

Investasi merupakan komponen sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Dari beberapa komponen percepatan pertumbuhan ekonomi seperti akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi, investasi sebagai akumulasi modal menjadi faktor dominan dalam memperbaiki dan melipatgandakan kualitas sumber daya fisik dan sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2006).

Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kebutuhan akan penanaman modal atau investasi, karena investasi adalah kebutuhan utama dalam pembangunan yang menghendaki adanya tingkat pertumbuhan. Investasi atau penanaman modal adalah motor suatu perekonomian yaitu banyaknya

investasi yang direalisasikan di dalam suatu negara yang bersangkutan, sedangkan sedikitnya investasi akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan ekonomi (Rosyidi, 2002).

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang tujuannya untuk mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia, baik dengan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan adanya peningkatan investasi diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah juga telah menerbitkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien sehingga mampu mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Berjalannya penanaman modal di suatu daerah mempunyai peran yang penting dalam menjalankan roda ekonomi daerah seperti membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Paradigma peran investasi baik dari sudut pandang makro maupun mikro menuntut adanya suatu perencanaan yang akurat, sistematis, terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan adanya perencanaan pengembangan penanaman modal dan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat memacu tumbuhnya penanaman modal daerah maupun nasional, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang besar, segala upaya yang mendorong peningkatan investasi mesti menjadi prioritas. Investasi swasta sangat bergantung pada insentif yang tersedia dan disediakan oleh pemerintah. Investasi akan mengalir ke lokasi yang aliran benefitnya lebih besar sehingga menarik investor. Dalam mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat disamping kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, investasi juga diharapkan tumbuh lebih cepat agar dapat menggerakkan sektor riil sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian Rustiono (2008) menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati pasar baik dalam maupun luar negeri. Potensi yang dimiliki dan mempunyai keunggulan adalah sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor jasa dan perdagangan serta sektor pertambangan.

Oleh karena itu, Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan penanaman modal memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan peningkatan investasi

di Sumatera Barat. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat merealisasikan program dan kegiatannya dengan baik. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana peran instansi terkait dalam pencapaian tujuan peningkatan penanaman modal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana “Pengaruh Kinerja Instansi Penanaman Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan:

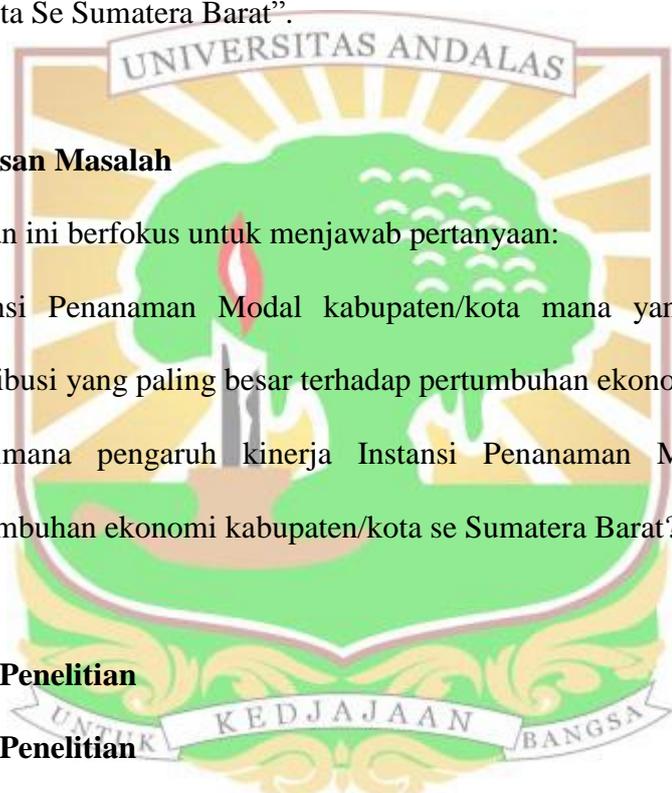
1. Instansi Penanaman Modal kabupaten/kota mana yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya?
2. Bagaimana pengaruh kinerja Instansi Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se Sumatera Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Instansi Penanaman Modal kabupaten/kota yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja Instansi Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se Sumatera Barat.



### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai kinerja pemerintah di bidang penanaman modal dimana penulis bekerja di sektor tersebut untuk menjadi pengalaman serta pelajaran yang berguna bagi pekerjaan penulis serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat S2 pada Program Magister di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### 2. Bagi Instansi/Pemerintah Daerah

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Instansi Penanaman Modal kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap tahunnya.

#### 3. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan penelitian dalam akuntansi sektor publik melalui pengembangan akuntansi pemerintahan untuk diteruskan dalam penelitian yang relevan.

### 1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah berupa penelitian kuantitatif untuk mengetahui kontribusi Instansi Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota dan pengaruh kinerja Instansi Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se Sumatera Barat.

2. Data yang digunakan adalah laporan realisasi PMA dan PMDN kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2010-2013 dan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2011-2014.

